



Malioboro Rendah Emisi Mulai November 2026

JOGJA—Kawasan Malioboro akan memasuki tahap baru penataan lingkungan mulai akhir November 2026 dengan penerapan kawasan rendah emisi. Dalam skema tersebut, kendaraan bermotor tidak lagi diperbolehkan melintas di kawasan Malioboro.

Aria Fajar Hidayat
ariaq@harianjogja.com

- ▶ Kendaraan yang diperbolehkan melintas nantinya hanya becak kayu, becak listrik, kendaraan darurat, dan *Trans Jogja*.
- ▶ Penerapan kawasan rendah emisi di Malioboro menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk menata kawasan Sumbu Filosofi Jogja.

Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menargetkan penerapan kawasan rendah emisi sebagai langkah konkret mengurangi emisi karbon di kawasan wisata tersebut sekaligus mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi.

Kepala Dishub DIY Chrestina Erni mengatakan kendaraan yang diperbolehkan melintas nantinya hanya becak kayu, becak listrik, kendaraan darurat, dan *Trans Jogja*.

“Target terdekat, akhir November nanti tidak ada lagi bentor di Malioboro. Yang boleh melintas hanya becak kayu, becak listrik, kendaraan darurat, dan *Trans Jogja*,” ujar Erni, Kamis (4/6).

Malioboro Rendah...

Menurut dia, penerapan kawasan rendah emisi akan berlangsung setiap hari dengan pengaturan lalu lintas yang lebih ketat. Selain becak motor berbahan bakar minyak, kendaraan bermotor lain seperti bajaj juga tidak diperbolehkan melintas di kawasan tersebut.

Dishub DIY saat ini juga mendorong percepatan penggunaan transportasi ramah lingkungan, termasuk penambahan armada becak listrik melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Selain kendaraan, infrastruktur pendukung juga mulai disiapkan. Pemerintah tengah mengembangkan fasilitas penunjang berupa stasiun Filosofi Jogja. Namun, pemerintah mengakui target menjadikan kawasan tersebut sepenuhnya bebas emisi karbon belum realistis untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF) DIY Aryanto Hendro Supranto mengatakan pendekatan yang dipilih saat ini adalah menurunkan emisi secara bertahap, dimulai dari kawasan yang memiliki aktivitas paling tinggi. "Kami tidak bisa mencanangkan sekarang langsung bebas emisi, karena banyak faktor. Tapi sebagai upaya, itu sudah dimulai," katanya, Kamis.

Menurut Hendro, penggantian becak motor menjadi becak listrik serta kebijakan pedestrianisasi yang telah berjalan di Malioboro menjadi fondasi awal menuju kawasan yang lebih ramah lingkungan. "Kalau mungkin tidak bisa nol emisi karbonnya, tetapi upaya untuk menjadikan kawasan ini rendah emisi itu sudah berjalan," ujarnya.

Pemilihan Malioboro sebagai titik awal bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut menjadi pusat pergerakan wisatawan sekaligus lokasi dengan tingkat aktivitas tertinggi di DIY.

"Sekitar 90 persen wisatawan datang ke Malioboro. Ini seperti ruang tamu, jadi bagaimana kita menyiapkan kawasan ini agar nyaman, tertata, dan lebih ramah lingkungan," kata Hendro.

Penataan Bertahap

Untuk kawasan lain di sepanjang Sumbu Filosofi, mulai dari Panggung Krpyak hingga wilayah utara menuju Gunung Merapi, penataan akan dilakukan secara bertahap.

Hendro mengatakan proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. "Penataan di kawasan selatan misalnya, tidak mudah. Harus dihitung dampak ekonominya, kesiapan masyarakatnya, pengaturan ruangnya, sampai lalu lintasnya. Itu perlu kajian yang serius," katanya.

Sejumlah pemerintah desa di kawasan selatan disebut telah menyusun konsep pengembangan wilayah masing-masing, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Beberapa pemerintah desa sudah punya *grand design*. Ini menarik karena datang dari bawah, tinggal bagaimana diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Meski berbagai langkah telah berjalan, pemerintah belum menetapkan target waktu penerapan kawasan rendah emisi untuk seluruh bentang Sumbu Filosofi. Menurut Hendro, tantangan sosial menjadi faktor yang membuat proses tersebut membutuhkan waktu panjang. "Secara fisik mungkin bisa cepat dihitung, tapi persoalan sosial itu jauh lebih rumit. Kita tidak bisa bilang selesai satu atau dua tahun," katanya.

Ia menambahkan jawatannya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur DIY terkait dengan tahapan implementasi berikutnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005